



Judul : ASN kembali terindikasi terlibat kelompok teroris
Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

PEMBERANTASAN TERORISME

ASN Kembali Terindikasi Terlibat Kelompok Teroris

JAKARTA, KOMPAS — Keterlibatan aparat sipil negara atau ASN dalam kelompok teroris kembali terungkap lewat penangkapan lima tersangka teroris di sejumlah wilayah di Banten, Selasa (15/3/2022). Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Apalagi, selain yang sudah terungkap terlibat kelompok teroris, ada lebih dari 19 persen ASN yang berpotensi berpemahaman radikal.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Ramadhan mengatakan, Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima tersangka terorisme anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) di sejumlah wilayah di Banten, Selasa (15/3). Mereka berinisial To, Gu, SS, UMB, dan Su. Dari kelima tersangka, salah satunya, To, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tangerang, Banten.

Penangkapan To menambah jumlah ASN yang terlibat dalam jaringan terorisme. "Sampai saat ini, jumlah tersangka dan narapidana terorisme berlatar belakang PNS 14 orang. Tersangka To, juga

seorang PNS," ujar Ahmad di Jakarta.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Gatot Repli Handoko mengatakan, dalam struktur JI, To menjabat sebagai sekretaris dan bendahara bidang bayan wilayah Banten. Selain itu, To berperan juga mengajukan nama-nama anggota JI untuk pelebaran struktur di tingkat koordinator daerah.

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen (Pol) Ahmad Nurwakhid mengatakan, pihaknya mencatat bahwa dalam kurun waktu 2010-2022, total ada 20 PNS yang telah ditangkap karena terlibat jaringan terorisme. Mereka terbukti tidak hanya menganut paham radikal, tetapi juga anggota kelompok teroris.

Selain terlibat jaringan terorisme, BNPT mendeteksi sejumlah ASN yang berpotensi radikal dan mengukurnya dalam bentuk indeks potensi radikalisme. "Hasil survei BNPT pada 2019 menunjukkan, indeks potensi radikalisme yang ada di ASN itu lebih dari 19 persen," ujar Nurwa-

khid. Namun, mereka tidak ditangkap karena belum memenuhi unsur tindak pidana terorisme.

Perubahan strategi

Menurut dia, keterlibatan sebagian ASN dalam kelompok teroris ataupun ASN yang berpotensi radikal itu merupakan imbas dari perubahan strategi kelompok teroris, terutama JI, yang tidak hanya mengutamakan kekerasan, tetapi juga mengutamakan dakwah. Mereka berkamufase dan bersiasat menyamarkan perannya di tengah masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjoe Kumolo mengatakan, pihaknya akan langsung menonaktifkan PNS yang tertangkap aparat karena terlibat terorisme. "Setelah terbukti (akan), diberhentikan sebagai PNS," katanya.

Untuk menangkal infiltrasi radikalisme pada ASN, pihaknya membuat portal aduan. Siapa saja dapat mengadukan ASN yang diduga berpemahaman radikal. Aduan itu nantinya diinvestigasi pihak yang kompeten, seperti BNPT dan Badan Intelijen Negara. (NIA)